

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Andri Haryono¹, Deti Nuryati², I Gusti Made Darma³

^{1,2,3} Stisip Bina Marta Martapura, Indonesia

Email : Andriharyono552@gmail.com¹, deti.maestro@gmail.com², made69687@gmail.com³

Abstrak

Rumusan masalah dari makalah ini adalah pengaruh variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, parsial atau stimulus terhadap Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan ADD dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin melalui variabel pendorong dan penghambat serta sejauh mana tujuan tercapai. Menggunakan enam kriteria penilaian penelitian evaluasi, daya tanggap, akurasi, dan data dari wawancara mendalam dengan informan kunci yang telah digunakan untuk menunjukkan fakta dan data di lapangan secara rinci dan jelas. Menurut temuan penelitian, meskipun kegiatan desa mengalami peningkatan dalam hal pembangunan, laju pembangunan berfluktuasi dari tahun ke tahun tergantung pada jumlah uang yang dibagikan. Desa Galih Sari masih kesulitan berjalan secara efisien karena kendala teknis dan kendala keterbatasan lapangan dalam penggunaan, pendistribusian, dan pelaporan penggunaan. Perencanaan strategis dan inisiatif jangka panjang diperlukan bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjalankan kebijakan ADD agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Kinerja.*

Abstract

The problems formulated from this paper are the influence of participatory, transparency, accountable, partially or stimulus variables on the Evaluation of Village Fund Allocation Management (ADD) in Galih Sari Districts Lalan District of Musi Banyuasin Regency. The approach utilized in this study is a descriptive way of analysis, which aims to explain how the ADD policy was implemented in Musi Banyuasin Regency through motivating and impeding variables as well as the degree to which the goal was reached. Using the six research assessment criteria—evaluation, responsiveness, accuracy, and data from in-depth interviews with key informants—that have been used to demonstrate the facts and data in the field in detail and clearly. According to the study's findings, although village activities have improved in terms of development, the rate of development fluctuates from year to year depending on the amount of money distributed. Galih Sari Village still struggles with running efficiently due to technical issues and troublesome field limits in the use, distribution, and reporting of use. Strategic planning and long-term initiatives are needed for the Musi Banyuasin District to execute the ADD policy in order for the benefits to be felt by medium- to lower-income people.

Keywords: *Transparency, Accountability, Performance.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pembangunan pedesaan terkait dengan kebijakan Pembangunan Nasional adalah suatu keniscayaan dimana secara filosofis guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah airnya serta ikut serta dalam ketertiban dunia melalui kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, mereka harus melindungi pendidikan, kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Di dalam pelaksanaan ADD di Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan ADD yang diterima. Merespon problem itu, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari anggaran perimbangan yang diterima kabupaten atau kota pada tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan desa secara keseluruhan yang digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau anggaran perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditopang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. (Kemendesa PDTT, 2017:5).

Desa

Istilah desa seringkali identik dengan masyarakat tradisional, desa juga ialah pelopor sistem demokrasi mandiri dan berdaulat penuh, di mana desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing – masing, akan tetapi sebetulnya desa mempunyai kearifan lokal yang luar biasa. Sementara itu di dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan kultur budaya setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Alokasi Dana Desa

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2006 menyebutkan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari sebagian anggaran perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 10 Perda ini, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keuangan desa berasal dari bagi hasil pajak daerah. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh melalui bagi hasil pajak daerah. Selain itu, adalah bagian dari anggaran perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Keuangan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan desa yang menyebutkan bahwa ADD berasal dari kabupaten minimal 10%, yakni:

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
3. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten
4. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerataan bantuan pemerintah dimungkinkan oleh Peraturan Nomor 72 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa semua desa harus memberikan kontribusi 70% dari Variabel Independen Utama ADD. Variabel Independen Tambahan dibagi di antara masing-masing desa berdasarkan rumus dan variabel yang termasuk dalam perhitungan bobotnya. Hal ini dilakukan dalam bentuk ADD proporsional, juga disebut sebagai ADD tertimbang. 60% dari ini diberikan kepada setiap desa dalam bentuk Variabel Proporsional Tambahan, dan 40% diberikan sebagai Variabel Dependen Tambahan.

Evaluasi

Menurut Thoha (2003:77), "Evaluasi adalah proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dicapai, definisi diatas menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, yang dimana sesuatu dapat dicapai".

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris dan berarti *assessment* atau penilaian. Dalam konteks bahasa, orang memahami evaluasi sebagai kegiatan terencana untuk mengukur keadaan suatu objek dengan menggunakan suatu alat dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan tolak ukur.

Mengumpulkan umpan balik dari evaluasi membantu komunitas menentukan seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Setiap hasil positif mendorong masyarakat dan memotivasi kemajuan di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan motivasi ketika hasilnya terbukti berhasil. Dan setiap hasil negatif memperjelas dimana perbaikan perlu dilakukan.

Para ahli dari bidang evaluasi telah mengembangkan berbagai jenis evaluasi program. Gaya yang berbeda ini sangat bervariasi, tetapi semuanya memiliki tujuan dengan memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis. Inilah sebabnya mengapa makalah ini menjelaskan teknik evaluasi program yang paling sering digunakan. Stufflebeam menciptakan model CIPP pada tahun 1967. Evaluasi program terbukti sangat efektif; Sedarmayanti menyebutkan hal ini dalam publikasi 2008-nya. CIPPGO ialah singkatan dari Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation dan Product Evaluation. CIPPGO mengacu pada metodologi untuk mengevaluasi area spesifik dari perencanaan dan pelaksanaan proyek. Masing-masing evaluasi ini membantu menentukan tindakan untuk proyek tersebut.

Kerangka Pemikiran

Kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan studi. Ini menunjukkan perkembangan pemikiran berdasarkan pertanyaan penelitian. Kerangka kerja ini mencakup beberapa ide dan hubungan di antara mereka (Polancik,2009).

Pertumbuhan desa adalah bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Ini juga adalah bagian penting dari siapapun yang mencari kemakmuran regional atau nasional karena menggabungkan fitur distribusi yang adil. Daerah pedesaan ialah tempat inisiatif ini secara langsung memberi manfaat bagi kebanyakan orang.

Untuk mencapai tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD), tujuannya adalah untuk menggunakan anggaran sebagai bantuan untuk stimulan atau anggaran tubuh. Ini membantu mendanai program desa yang bertumpu pada gotong royong masyarakat dalam menyelesaikan kegiatan pemerintahan. Selain itu, mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mendanai proyek melalui gotong royong desa. Inilah sebabnya mengapa setidaknya 10% dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dialokasikan untuk desa yang disebut Alokasi Dana Desa. Terakhir, pemerintah secara finansial mendukung dm esa, atau bantuan keuangan langsung, yang adalah salah satu dari banyak program yang didukung.



Sumber : Diadopsi dari Teori Evaluasi Stufflebearn (1967) dalam Sedarmayanti (2008:44)

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Alasan penulis memilih metode tersebut karena permasalahan yang penulis angkat ialah permasalahan yang bersifat general serta kompleks. Dengan demikian akan sulit apabila menggunakan metode penelitian kuantitatif, karena harus digali secara mendalam mengenai substansi permasalahan yang ada, mengingat masyarakat Desa Galih Sari menaruh harapan besar terhadap pembangunan yang di anggarani oleh ADD, demi terwujudnya sarana dan prasarana di desa yang lebih baik lagi.

Fokus Penelitian

Untuk akurasi dan efisiensi hasil penelitian, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

a. Konteks

Menentukan kebutuhan yang akan dicapai dan menentukan sasaran program ADD di Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Input

ialah model yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara agar penggunaan ADD bisa berjalan sesuai program. Aspek input juga membantu menentukan prosedur dan desain untuk mengimplementasikan program, menentukan sumber-sumber yang ada, dan alternatif apa yang diambil.

c. Proses

Evaluasi Proses dilaksanakan dengan harapan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana program ADD di Desa Galih Sari, serta bagaimana kesiapan perangkat desa dalam evaluasi pengelolaan ADD tersebut dan untuk memperbaiki kualitas program dari program yang berjalan serta memberikan informasi sebagai alat untuk menilai apakah sebuah program ADD di Desa Galih Sari relatif sukses atau gagal.

d. Produk

Evaluasi produk meliputi, mengukur efektivitas program ADD di Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Seberapa besar hasil yang telah dicapai dan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Gambaran General Lokasi Penelitian

Kecamatan lalan dengan luas wilayah 1.031,00 km² atau sekitar 3 persen dari luas Kabupaten Musi Banyuasin, secara geografis terletak pada posisi antara 1,3^o sampai dengan 4^o Lintang Selatan dan 103^o sampai dengan 104^o, 45'' Bujur Timur. Batas daerah ini adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bayung Lencir
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tungkal Jaya
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Sungai Lilin
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Tungkal Ilir (Kab. Banyuasin)

Kecamatan lalan dengan luas wilayah 1.031,00 km² atau sekitar 3 persen dari luas Kabupaten Musi Banyuasin, terbagi atas 27 Desa.

Administrasi

Secara administrasi Kecamatan Lalan terdiri dari 27 Desa untuk melihat jumlah Desa dan luas wilayah di masing-masing desa di Kecamatan Lalan dapat dilihat Tabel 2 berikut :

Table 1. Luas Wilayah Per- Desa di Kecamatan Lalan

No	Nama Desa	Luas Wilayah	
		(Km ²)	(%) Thdp Total
1	Agung Jaya	52.96	3.1
2	Bandar Agung	34.49	2.3
3	Bumi Agung	44.96	3.3
4	Galih Sari	63.87	4.6
5	Jaya Agung	33.17	2.0
6	Karang Agung	19.25	1.3
7	Karang Makmur	31.43	2.3
8	Karang Mukti	32.23	2.0
9	Karang Rejo	41.12	3.1
10	Karang Sari	36.11	2.0
11	Karang Tirta	32.81	2.6
12	Karya Mukti	30.29	2.1
13	Madya Mulya	40.15	3.1
14	Mandala Sari	41.22	3.1
15	Mekar Jaya	33.91	2.7
16	Mekar Sari	41.32	3.1
17	Mulya Agung	39.58	2.4
18	Mulya Jaya	37.22	2.1
19	Perumpung Raya	42.19	3.0
20	Purwa Agung	35.31	2.0
21	Ringin Agung	32.88	2.8
22	Sari Agung	43.35	3.3
23	Sri Gading	44.11	3.0
24	Suka Makmur	32.67	2.7
25	Sukajadi	50.21	3.9
26	Tri Mulya Agung	53.21	3.5
27	Sri Karang Rejo	43.26	3.3

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Kab. Muba Tahun 2013

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Desa Galih Sari ialah sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menemukan data untuk mencari jawaban terkait permasalahan dalam penelitian ini, penulis berusaha mengadakan observasi lapangan, dan mengadakan wawancara dengan beberapa informan baik dari pihak Pemerintah Desa maupun Tokoh Agama, Tokoh Adat, maupun Tokoh Masyarakat di Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Indonesia memulai sistem yang disebut Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2005. Sistem ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah dikukuhkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini mewajibkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mentransfer anggaran dari rekening general mereka ke rekening khusus yang disebut Alokasi Dana Desa, atau ADD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD, mendanai Alokasi Dana Desa (ADD). Ini ialah anggaran yang dikelola kas daerah melalui penyaluran sumber keuangan dari kas desa. ADD digunakan untuk mendanai kebutuhan desa terkait dengan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan proyek pembangunan. Proyek pembangunan fisik dan non fisik Desa Galih Sari direncanakan oleh pemerintah melalui proses evaluasi. Proyek-proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga mereka dapat berkembang dengan kecepatan yang sama. Hal ini diatur dan dikelola melalui penganggaran yang cermat guna memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.

Indikator Teori Evaluasi Model Cipp

ASPEK EVALUASI	PENGERTIAN	PARAMETER	PERTANYAAN WAWANCARA
Konteks	Kelebihan dan kelemahan serta situasi kondisi yang ada, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ADD.	Faktor pendukung ADD Faktor penghambat ADD Kondisi Geografis Kondisi Sosial	Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam pengelolaan ADD ?
Input	Sumber-sumber daya yang dibutuhkan & digunakan untuk pelaksanaan ADD. (Manusia,Duit,Kebijakan,Tekhnologi).	SDM Keuangan Kebijakan/Aturan-aturan Tekhnologi	Bagaimana aturan anggaran anggaran bantuan ADD yang diberikan?
Proses	Prosedur-prosedur yang ada dan mekanisme. Pembagian tugas dan tanggung jawab.	Juklak dan Juknis ADD Mekanisme Pencairan Mekanisme Pelaporan Mekanisme Pengambilan Keputusan.	Apakah tanggungjawab yang dipegang oleh Desa Galih Sari Sudah Optimal?
Produk	Keluaran tentang apa yang dicapai atau di hasilkan dari program.	Pencapaian Target Produk-produk Program	Apakah pencapaian program ADD sangat membantu

Fisik (pemberdayaan Masyarakat).	masyarakat Desa Galih Sari ?
Non Fisik (Belanja Aparatur & Operasional Pemerintah Desa).	

Sumber : Diadopsi dari Teori Evaluasi Stufflebearn (1967) dalam Sedarmayanti (2008:44)

Konteks

Tujuannya ialah untuk memahami efektivitas pemerintahan desa Galih Sari dengan melihat kekuatan dan kelemahannya. Dengan informasi ini, desa akan dapat mengembangkan rencana perbaikan yang diperlukan. menjelaskan bahwa mengevaluasi konteks ialah upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, demografi yang dinilai, dan tujuan dari proyek yang direncanakan. Saat mengevaluasi keadaan konteks, penting untuk mempertimbangkan kondisi aktual lingkungan dan kondisi yang diharapkan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, Anda dapat memahami tujuan keseluruhan dari program tertentu. Inilah sebabnya mengapa pernyataan di atas dapat dianggap sebagai penjelasan singkat tentang evaluasi konteks.

Wawancara dengan pemerintah Desa Galih Sari yang membidangi alokasi anggaran memberikan wawasan tentang faktor pendukung dan penghambat di balik keputusan penanggulangan desa. Dari situ, ADD dapat menggunakan hasilnya untuk menganalisis dan melaporkan keputusan pengelolaan anggaran desa hingga tahap akhir pengelolaan ADD. Ini termasuk memeriksa seberapa baik anggaran dialokasikan untuk pembangunan. Di Kecamatan Lalan, Desa Galih Sari, Indonesia, proses ini disebut sebagai pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan.

Berbagai faktor masyarakat Desa Galih Sari dan pemerintah desa menghambat peningkatan pembangunan di desa tersebut. Ini termasuk masalah dengan kemampuan administrasi pemerintah desa: Sumber daya manusia yang dimaksud di sini baik yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa maupun Anggaran Desa. Secara spesifik terkait dengan kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola ADD yang diperoleh dari anggaran.

Input

Evaluasi input atau evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana dan prasarana (teknologi)
- c. Anggaran atau Anggaran
- d. Berbagai Prosedur dan aturan yang diperlukan.

Tahapan masukan pada prosedur yang harus dilalui dalam mengusulkan masukan melalui peraturan daerah. Dengan proses yang demikian tersebut, tentunya tahapan pengelolaan ADD akan bekerja dengan baik.

Proses

Evaluasi proses melibatkan pengumpulan data yang menilai keberhasilan program tertentu. Data ini kemudian diterapkan untuk meningkatkan program masa depan dengan memperbaiki kekurangannya dan meningkatkan akurasi prosedurnya. Biasanya, evaluasi proses melihat keberhasilan rencana keseluruhan program dengan menilai apakah telah dilaksanakan dengan benar.

Itu terlihat pada setiap komponen rencana untuk menentukan mana yang perlu disempurnakan. Evaluasi proses dalam model CIPP mengacu pada "apa," atau kegiatan tertentu, yang dilakukan dalam program. Ini juga memeriksa siapa — atau dalam hal ini, orang tertentu — yang bertanggung jawab atas program tersebut. Sesuai model CIPP, evaluasi proses melihat sejauh mana setiap kegiatan yang direncanakan telah selesai.

Produk

Memberikan pengertian evaluasi produk/ hasil ialah "to allow to project director (or teacher) to make decision of program". Dari evaluasi proses diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau perangkat desa untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Setelah menjalankan program, keputusan tambahan harus dibuat tentang hasilnya. Ini karena mengevaluasi suatu produk memungkinkan pengambilan keputusan di masa depan. Dari pengertian tersebut, evaluasi produk ialah proses penilaian keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan tertentu. Pada titik inilah penilai dapat menentukan rekomendasi untuk melanjutkan, meningkatkan, atau menghentikan proyek.

Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan buku panduan bagaimana mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik. Buku ini kini menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Galih Sari mereka dalam menerapkan ADD di daerahnya. Dukungan pemerintah terhadap ADD ditunjukkan melalui regulasi ADD yang masih digunakan hingga saat ini oleh Pemerintah Desa Galih Sari.

Perangkat desa di Galih Sari menampilkan kemampuan dan keahlian yang luar biasa di bidangnya. Berdasarkan sifat-sifat ini, mereka telah membuktikan diri mampu menjalankan operasi desa secara efektif. Selain itu, personel di distrik ini menunjukkan dedikasi yang besar terhadap tugas yang mereka kembangkan.

2. Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sulit untuk mencapai tujuan desa apabila tidak ada koordinasi yang cukup antara desa dan kecamatan. Hal ini karena perencanaan di setiap level memiliki masalah yang signifikan. Saat ini banyak sarana dan prasarana desa yang tidak diperbaiki karena kurangnya koordinasi antara tingkat desa dan kecamatan. Ini bermasalah karena ADD yang mengalokasikan anggaran desa mengalami kesulitan karena keputusan kecamatan. Selain itu, pasar dan gedung serbaguna tidak terawat karena belum tersentuh ADD yang tertatih-tatih dengan keputusan yang dibuat di tingkat kecamatan.

Alokasi Dana Desa mendukung penyelenggaraan pemerintahan; jumlah ADD ini terbatas. Perangkat desa menyatakan bahwa anggaran masih kurang dan tidak boleh diabaikan. Anggaran vital ini membantu mengembangkan infrastruktur dan sumber daya wilayah tertentu. Beberapa warga Desa Galih Sari sedikit atau tidak paham tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi mereka dengan masyarakat akibat minimnya informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Minimnya sosialisasi mereka juga membuat mereka sulit berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD). Akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang Alokasi Dana Desa, maka akan sulit bagi warga untuk memahami tugasnya selama pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemberdayaan masyarakat dan berkontribusi pada isu-isu proyek.

SIMPULAN

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan pelaksanaan. Langkah ketiga adalah akuntabilitas—saat Musrenbangdes yang diadakan oleh tim Pelaksana Alokasi Dana Desa mencermati anggaran Desa Galih Sari. Namun, partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes masih minim karena kurangnya transparansi saat Desa Galih Sari melaporkan informasi kepada masyarakatnya. Meskipun keberhasilan pelaksanaan distribusi anggaran tidak sebesar yang diharapkan, hal ini antara lain karena kurangnya transparansi mengenai rencana Desa Galih Sari yang mengakibatkan kurang berhasilnya. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa Galih Sari cacat pada tahap akuntabilitasnya. Karena penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak ditangani oleh pemerintah Desa Galih Sari, maka tidak dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa tidak menyiapkan laporan itu sendiri — langkah yang diperlukan untuk laporan pertanggungjawaban apa pun. Hal ini dikarenakan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada setiap tahapannya tidak selaras dengan prinsip dan tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Alih-alih mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat, justru mengutamakan tim evaluasi yang mengutamakan kegiatan pembangunan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 2009. Dasar - dasar Evaluasi Pembangunan, Jakarta : PT Rineka Cipta hal.210
- Arikunto, Suharsimi. 2005. Prosedur Pembangunan. Jakarta. PT Rineka CiptaBadan Pusat Statistik (BPS). 2003. Survei Demografi dan Penduduk Indonesia (SDPI) 2002-2003.
- Bapenas dan Unicef. 2000. Laporan Indonesia untuk persiapan End Decade Goal 2003.
- Hidayat (2013), Budaya Politik , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka UtamaHanafiah, K.A. 2002. Dasar-dasar Ilmu pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan Nasional PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hasan, Ir. M. Iqbal. M.M. 2002. Pokok-pokok Materi Evaluasi dan Aplikasinya . Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, Soewarno, 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi danManagement, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Mulyana.Deddy.2007.Komunikasi sebagai pengantar .Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Martini dan Lubis 2007. Teori Organisasi. Bandung : Ghalia Indonesia Maskun, Sumitro. 1993. Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Media Widya mandala.
- Miles, & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rostow . 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : Gramedia pustaka Utama.
- Rostow, Mansour. 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist press.
- Raharjo, Willy Sudiarto.(2002). Materi Perkuliahan Keswadayaan Masyarakat – UML: Activity Diagram . Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. Psikologi Komunikasi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukirno, Sadono, 2001. Ekonomi Pembangunan, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indinesia, Bima Grafika.
- Sutoro , 2007. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa . Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah ertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Siagian, Sondang , 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia , cetakan Ketujuh, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Siagian, sondang 2000.Adminitrasi Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung Sobur, A., 2003. Psikologi General , Bandung: Pustaka Setia. hal 43-45Surjadi. 2005. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Saverin, Rachmat, 2005. Teknis Praktis Riset Komunikasi , Jakarta : Kencana Prenada Media G roup.
- Sudarmayanti, Sumber Daya manusia dan Produktivitas Kerja , Madar maju, Bandung 2008.
- Siegel, Strees. 2007. Statistik Nonpara metrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Diterjemahkan oleh Zanzawi

- Suyuti dan Landung Simatupang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan Ketujuh, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Siagian, sondang 2000. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2005. Penataan Birokrasi Publik Memasuki Era Milenium, Yogyakarta: YPAPI.
-, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi, dan Kasus, Cetakan I. Yogyakarta: Kerjasama Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dengan Lukman Offset.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3S.
-, 2001. Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES. Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administrasi Di Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi UGM.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2003, dalam tulisannya yang berjudul Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administrasi di dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi UGM.
-, 2005. Alternatif Perencanaan Sosial-Budaya Menuju Terwujudnya Manusia Indonesia Seutuhnya. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FISIPOL UGM Yogyakarta, 29 Juni 2005.
-, 2005. Teori Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
-, 2001. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Balai Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael P. 2003. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Todarao Michael, Smith Stephen. 2004. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan. Jakarta: PT Gelora aksara Pratama.
- Tanenbaum, Andrew S ; Computer Networks ; New Jersey : Prentice Hall PTR. Fourth Edition, 2005.
- Thoha. 2008. Kompetensi Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyoko, Eko Putro. 2013. Evaluasi Program Pembelajaran Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksana ADD.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Permendagri Nomor. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa .
- Peraturan pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor.15 Tahun 2017 tentang pelaporan dan pertanggung jawaban dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa
- Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa
- Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 130:2003 Tentang Organissi dan Tata Kerja Depertemen Dalam Negeri.
- Maulina, Anis. 2014. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas (Pengelolaan Alokasi Dana Desa). Edisi 1. Tahun 2014.
- Putra, Dian Pramana. 2013. Pengawasan BPD (Pengelolaan Alokasi Dana Desa). Edisi 1. Tahun 2015.
- Ripka B, 2014. "Evaluasi program Pembangunan Desa". Edisi 1. Tahun 2015.
- Jurniadi. 2015. Pengaruh variabel (Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa). Edisi 1. Tahun 2015.
- Sujianto. 2003. Lembaga Komunitas Lokal (Kasus Masyarakat Marginal). Edisi 4. Tahun 2003.
- Sulistyowati, 2013. "Kebijakan Otonomi Daerah" (Pencapaian hasil dan output atas dijalankan kebijakan ADD).
- Suwandi, 2015. Partisipasi Masyarakat (Pelaksanaan Alokasi Dana Desa)
- <http://www.bookpedia.com//caribukuevaluasi..>
- <http://www.bookilmupemerintahan.go.id/pedomanalokasianggarandes/HTML/page39.html>.
- <http://wordpress.com/teori-tahap-tahap-pertumbuhan-walt-whitman-rostow>.